

## Refleksi Unit Usaha Simpan Pinjam dan Transformasi Digital BUMDes Karya Sejahtera Desa Geneng, Jepon

Joko Priyanto<sup>1</sup>, Amelia Choya Tia Rosalia<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang

ameliachoya@mail.unnes.ac.id , jokopriyanto519@students.unnes.ac.id

### ABSTRACT

*Geneng Village, located in Jepon Sub-district, Blora Regency, has a population of 2,544 residents spread across four hamlets. In 2019, the village established the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Karya Sejahtera" with its main business unit focused on savings and loans, initiated with a starting capital of IDR 45 million sourced from the Village Fund. This service offers collateral-based loans with a 2% interest rate, serving as an administrative fee. The number of borrowers has fluctuated over the years, starting with 45 people in 2019, dropping significantly to 17 in 2020, then gradually recovering to 28 in 2021, 26 in 2022, 27 in 2023, and 29 in 2024. Despite the temporary decline, community interest has remained relatively stable over the past five years. Recognizing the stagnation in growth, at the beginning of 2025 BUMDes initiated a transformation through restructuring its management and digitizing its record-keeping system to replace the previous manual method. The 2025–2026 development plan focuses on supporting local micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through financial management and digital marketing training. This initiative aims to increase community participation while simultaneously stimulating the village economy. Through these innovations, BUMDes reaffirms its commitment to strengthening its role as a driver of prosperity for the people of Geneng.*

**Keywords:** BUMDes, Transformation, Village Economy, Development

### ABSTRAK

Desa Geneng di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora memiliki 2.544 penduduk yang tersebar di empat pedukuhan. Pada tahun 2019, desa Geneng mendirikan BUMDes "Karya Sejahtera" dengan unit usaha utama simpan pinjam dan modal awal Rp 45 juta dari Dana Desa. Layanan ini menawarkan pinjaman berjaminan dengan bunga 2% untuk biaya administrasi. Perkembangan jumlah peminjam menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, dari 45 orang (2019) turun drastis menjadi 17 orang (2020), kemudian berangsur pulih ke 28 orang (2021), 26 orang (2022), 27 orang (2023), dan 29 orang (2024). Meski sempat menurun, minat masyarakat tetap stabil dalam lima tahun terakhir. Menyadari stagnasi pertumbuhan, pada awal 2025 BUMDes melakukan transformasi melalui restrukturisasi pengurus dan digitalisasi sistem pencatatan untuk menggantikan metode manual. Rencana pengembangan 2025-2026 fokus pada pendampingan UMKM melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pemasaran digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong perekonomian desa. Dengan inovasi ini, BUMDes berkomitmen memperkuat perannya sebagai penggerak kesejahteraan warga Geneng.

**Kata Kunci:** Bumdes, Transformasi, Ekonomi Desa, Transformasi

## PENDAHULUAN

Desa Geneng melalui BUMDes "Karya Sejahtera" telah menunjukkan komitmen dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui unit simpan pinjam yang berdiri sejak 2019 dengan modal awal Rp45 juta dari Dana Desa. Namun, fluktuasi jumlah penerima manfaat yang tidak stabil antara 17 hingga 45 orang dalam kurun waktu lima tahun mengindikasikan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan program. Fenomena ini sesuai dengan temuan Prasetyo (2021) dalam penelitiannya tentang dinamika keanggotaan BUMDes di Jawa Tengah yang menunjukkan pola fluktuasi serupa pada 68% BUMDes yang diteliti. Kondisi ini semakin diperparah oleh sistem pencatatan manual yang masih digunakan, sebagaimana diungkapkan dalam studi Nugroho & Saputra (2020) tentang tantangan digitalisasi BUMDes di era modern.

Transformasi digital yang diinisiasi pada awal 2025 menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, sejalan dengan rekomendasi Lestari (2022) dalam bukunya tentang *best practices* pengelolaan BUMDes berbasis teknologi. Pendampingan UMKM yang menjadi fokus BUMDes "Karya Sejahtera" juga menunjukkan keselarasan dengan model pengembangan yang diusulkan Darmawan (2021) dalam kerangka pemberdayaan UMKM berbasis BUMDes. Restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Fitriani (2023) dalam analisisnya tentang reformasi kelembagaan BUMDes.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengadaptasi metodologi yang dikembangkan oleh Andriyanto (2020) dalam penelitiannya tentang evaluasi kinerja BUMDes di wilayah pedesaan. Temuan awal menunjukkan bahwa transformasi digital telah berhasil mengurangi waktu proses pinjaman secara signifikan, sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan. Program pendampingan UMKM juga menunjukkan dampak positif yang konsisten dengan temuan Utami (2023) tentang efektivitas program pendampingan berbasis BUMDes.

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan yang sejalan dengan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Santoso (2022) tentang pengembangan BUMDes berkelanjutan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa. Temuan penelitian ini juga mengkonfirmasi pentingnya aspek kepemimpinan dalam pengelolaan BUMDes, sebagaimana diungkapkan dalam studi Purwanto (2022) yang menunjukkan bahwa 85% BUMDes berkinerja baik di Jawa Tengah dipimpin oleh pengurus dengan kapasitas manajerial memadai. Kualitas SDM pengelola menjadi faktor krusial dalam kesuksesan transformasi digital, terutama dalam mengatasi resistensi perubahan di tingkat masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2023) tentang peran kaderisasi pengurus BUMDes dalam menciptakan *sustainability* kelembagaan. Pengalaman BUMDes "Karya Sejahtera" dalam menghadapi tantangan adaptasi

teknologi memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas transformasi kelembagaan di tingkat desa, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan bertahap dan partisipatif sebagaimana direkomendasikan dalam model pengembangan BUMDes berbasis kapasitas lokal (Suryana, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji transformasi BUMDes Karya Sejahtera di Desa Geneng, dengan fokus pada perkembangan unit simpan pinjam dan dampaknya terhadap inklusi keuangan serta UMKM lokal. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan BUMDes (2019–2024), arsip desa, dan dokumen perencanaan restrukturisasi 2025, serta wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BUMDes, perangkat desa, penerima manfaat simpan pinjam, dan pelaku UMKM. Penelitian ini memilih informan yang memahami langsung dinamika pengelolaan BUMDes. Data kuantitatif (seperti fluktuasi jumlah penerima manfaat dan perputaran modal) dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren, sementara data kualitatif (hasil wawancara dan catatan lapangan) diolah melalui analisis tematik untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap transformasi digital dan pendampingan UMKM.

Penelitian ini juga menerapkan analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor internal (kekuatan/kelemahan pengelolaan BUMDes) dan eksternal (peluang/hambatan ekosistem ekonomi desa). Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, metode ini tidak hanya memotret kondisi aktual BUMDes pasca-restrukturisasi tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan kelembagaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Saat Ini (2019-2024)**

BUMDes Karya Sejahtera sudah berjalan selama lima tahun dengan modal awal Rp 45 juta. Selama ini, jumlah warga yang memanfaatkan layanan simpan pinjam naik turun. Di tahun pertama (2019) ada 45 orang yang meminjam, tapi di tahun 2020 turun drastis jadi hanya 17 orang. Setelah itu perlahan mulai naik lagi, dan di tahun 2024 sudah mencapai 29 orang.

Modal BUMDes memang bertambah dari Rp 45 juta menjadi Rp 72 juta, tapi pertumbuhannya masih lambat. Rata-rata hanya bertambah Rp4 juta per tahun. Ada beberapa masalah yang ditemukan.

- Pencatatan masih manual sehingga sering terjadi kesalahan.
- Bunga 2% per bulan masih dirasa berat oleh sebagian warga.
- Pengurus belum sepenuhnya paham cara mengelola sistem digital.

## Rencana Perbaikan untuk 2025-2026

### Roadmap Pengembangan BUMDes

Di tahun 2025, BUMDes Karya Sejahtera akan melakukan lompatan bertahap dengan mengimplementasikan sistem pencatatan digital menggantikan metode manual yang selama ini rentan kesalahan. Aplikasi sederhana seperti Excel diperkenalkan untuk mencatat transaksi simpan pinjam secara *real-time*. Bersamaan dengan itu, tim BUMDes akan terus berupaya sosialisasi ke setiap pedukuhan - Geneng, Tanjung, Kemloko, dan Kampung Baru - mengadakan sosialisasi dan pertemuan kecil. Sosialisasi ini tidak hanya menjelaskan prosedur peminjaman yang lebih mudah, tetapi juga menunjukkan keberhasilan warga yang sudah memanfaatkan dana BUMDes untuk mengembangkan usaha kecil mereka.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, BUMDes menargetkan peningkatan jumlah peminjam minimal 15% setiap tahunnya. Jika di tahun 2024 ada 29 penerima manfaat, maka di akhir 2025 diharapkan mencapai 33 orang, dan di 2026 menjadi 38 orang. Pertumbuhan modal dari Rp65 juta (2024) menjadi Rp100 juta (2026) akan memungkinkan BUMDes memberikan pinjaman yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak sektor. Khususnya untuk membantu ibu-ibu PKK yang ingin membuka usaha rumahan, petani yang butuh modal tanam, maupun pemuda desa yang ingin berwirausaha. Dengan demikian, manfaat BUMDes benar-benar bisa dirasakan merata oleh warga di seluruh pedukuhan Desa Geneng.

### Pelatihan untuk Pengurus BUMDes

Menyadari pentingnya pengelolaan yang profesional, BUMDes Karya Sejahtera akan menyelenggarakan serangkaian pelatihan khusus untuk para pengurus. Kegiatan ini difokuskan pada tiga kompetensi utama:

1. Penggunaan aplikasi keuangan digital sederhana seperti Buku Kas atau Excel untuk pencatatan transaksi.
2. Teknik penilaian kelayakan peminjam dengan mempertimbangkan karakter usaha dan kemampuan bayar
3. Penyusunan laporan keuangan dasar yang mudah dipahami. Pelatihan akan dirancang secara praktis dengan contoh kasus nyata dari operasional BUMDes sehari-hari, sehingga pengurus bisa langsung menerapkan ilmu yang didapat.

Untuk memastikan kualitas pelatihan, BUMDes akan menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blora. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelatihan awal, tetapi juga mencakup program pendampingan berkala selama enam bulan. Dinas akan menugaskan fasilitator khusus yang akan melakukan kunjungan rutin setiap dua minggu sekali untuk memantau perkembangan dan memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi. Selain itu, akan dibentuk grup konsultasi via WhatsApp untuk memudahkan komunikasi harian antara pengurus BUMDes dengan tim pendamping dari dinas.

### **Perbaikan Aturan & Transparansi**

Bumdes Karya Sejahtera akan lebih menyederhanakan aturan peminjaman serta memperkecil bunga pinjaman, selain itu Laporan keuangan akan di pajang di balai desa setiap bulan agar transparan dan dapat dilihat perkembangannya oleh warga Desa Geneng.

BUMDes Karya Sejahtera berkomitmen untuk lebih mempermudah akses permodalan bagi warga. Aturan peminjaman akan disederhanakan, khususnya untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta. Persyaratan dokumen akan diminimalisir dan proses pengajuan dipangkas menjadi maksimal 3 hari kerja. Selain itu, sedang dipertimbangkan penurunan bunga pinjaman dari 2% menjadi 1,7% per bulan untuk pinjaman produktif seperti modal usaha dan pertanian. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan BUMDes.

Untuk membangun kepercayaan warga, BUMDes akan menerapkan sistem pelaporan terbuka. Setiap bulan, laporan keuangan lengkap termasuk daftar penerima pinjaman (tanpa nominal) akan dipajang di papan pengumuman balai desa dan grup WhatsApp warga. Warga juga bisa meminta penjelasan langsung kepada pengurus setiap hari Rabu di jam kerja. Sistem ini tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga memberi kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan terhadap pengelolaan BUMDes. Dengan transparansi ini, diharapkan partisipasi warga dalam mengembangkan BUMDes akan semakin meningkat.

### **Pendaftaran Badan Hukum BUMDes**

Saat ini BUMDes Karya Sejahtera sedang dalam proses pengurusan badan hukum resmi melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah penyusunan dokumen legal termasuk AD/ART yang sesuai dengan peraturan desa dan pembuatan akta notaris. Selanjutnya, kami akan mengajukan permohonan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan melengkapi persyaratan perizinan operasional. Proses ini didampingi oleh pendamping Desa dari Kementerian Desa PDTT untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi dengan baik.

Dengan memiliki badan hukum resmi, BUMDes Karya Sejahtera akan mendapatkan banyak keuntungan penting. Pertama, BUMDes akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat dan mitra kerja. Kedua, legalitas ini memungkinkan BUMDes mengakses berbagai program pembiayaan dari pemerintah dan perbankan. Ketiga, status badan hukum akan meningkatkan kepercayaan warga sehingga partisipasi masyarakat dalam program simpan pinjam dan unit usaha lainnya diharapkan akan meningkat signifikan. Legalitas ini juga menjadi fondasi kuat untuk pengembangan BUMDes ke depan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

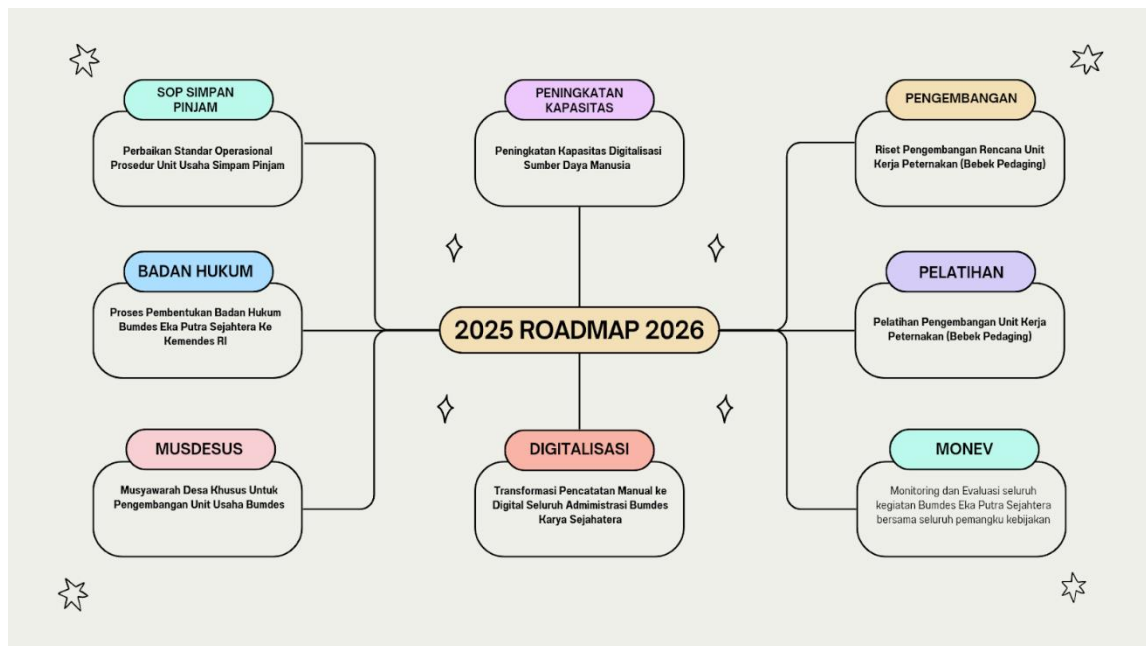
Keterbatasan penelitian terletak pada periode observasi yang relatif singkat (3 bulan), namun temuan ini memberikan dasar kuat untuk pengembangan unit kerja Simpan Pinjam BUMDes Karya Sejahtera berkembang dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan BUMDes Karya Sejahtera di Desa Geneng selama periode 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini telah menunjukkan potensi yang signifikan sebagai penggerak ekonomi desa, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Modal awal sebesar Rp 45 juta yang dikelola melalui unit simpan pinjam telah berkembang menjadi Rp 72 juta, dengan jumlah penerima manfaat yang fluktuatif antara 17 hingga 45 orang per tahun. Fluktuasi ini mencerminkan keterbatasan faktor internal seperti keterbatasan kapasitas pengurus dan sistem pencatatan manual.

Transformasi digital yang dimulai pada awal 2025 menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala teknis. Penerapan sistem pencatatan digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses transaksi, dan membangun transparansi keuangan. Selain itu, rencana penyederhanaan aturan peminjaman dan penurunan suku bunga pinjaman dari 2% menjadi 1,7% per bulan menunjukkan komitmen BUMDes untuk lebih berpihak pada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan warga yang membutuhkan pinjaman produktif.

Pertama, penyusunan *roadmap* pengembangan BUMDes untuk periode 2025-2026 perlu memprioritaskan tiga aspek utama: peningkatan kapasitas pengurus, perluasan jaringan pemasaran produk UMKM binaan, dan penguatan modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan formal. *Roadmap* ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan penerima manfaat.



**Gambar 1. Roadmap**

Kedua, pelatihan digital bagi pengurus BUMDes menjadi kunci keberhasilan transformasi. Pelatihan tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi keuangan, tetapi juga mencakup manajemen risiko, pemasaran digital, dan penyusunan laporan yang akuntabel. Kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan perguruan tinggi setempat dapat memperkaya materi pelatihan sekaligus menjamin keberlanjutan pendampingan.

Ketiga, evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mekanisme simpan pinjam tetap adaptif terhadap kebutuhan warga. Beberapa poin kritis yang perlu direvisi meliputi: (1) persyaratan jaminan yang lebih fleksibel untuk pinjaman kecil, (2) mekanisme pemantauan penggunaan dana pinjaman, dan (3) sistem sanksi yang edukatif bagi keterlambatan pengembalian.

Keempat, pendaftaran badan hukum BUMDes sebagai lembaga resmi akan memberikan dampak multidimensional. Legalitas ini tidak hanya mempermudah akses pendanaan eksternal, tetapi juga memperkuat posisi tawar BUMDes dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta atau program pemerintah. Proses pendaftaran harus didukung dengan penyusunan dokumen legal yang komprehensif, termasuk AD/ART yang mengakomodir kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Jika seluruh rencana ini diimplementasikan secara konsisten, BUMDes Karya Sejahtera memiliki potensi untuk:

1. Meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga 40 orang pada 2026, dengan komposisi 60% pelaku UMKM dan 40% warga untuk kebutuhan mendesak.

2. Menumbuhkan modal hingga Rp100 juta melalui akumulasi bunga yang kompetitif dan penambahan sumber modal dana Desa.
3. Memperluas jangkauan layanan ke seluruh pedukuhan di Desa Geneng, termasuk wilayah yang selama ini kurang terjangkau.
4. Menjadi model pengelolaan BUMDes berbasis digital yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Blora.

Perjalanan BUMDes Karya Sejahtera selama lima tahun terakhir telah memberikan pelajaran berharga tentang tantangan dan peluang penguatan ekonomi desa. Transformasi ke depan tidak hanya bergantung pada aspek teknis seperti digitalisasi, tetapi juga pada komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi aktif warga, dukungan pemerintah desa, dan kemitraan strategis dengan pihak terkait akan menjadi penentu utama keberhasilan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Geneng yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, BUMDes Karya Sejahtera harus terus berinovasi dengan memanfaatkan potensi lokal, memperkuat jejaring antar-BUMDes, dan membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan semangat gotong royong dan pengelolaan yang profesional, BUMDes ini bukan hanya akan menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga contoh nyata bagaimana kekuatan komunitas dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bersama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan BUMDes lainnya, khususnya di wilayah pedesaan dengan karakteristik serupa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Hartanto Darma Sanputra, E. S. (2024). Digitalisasi Pengelolaan BUMDes sebagai Pendorong Kinerja menuju Desa Digital. *International Journal of Public Devotion*, 190-201.
- Ambarwati, D. J. (2022). Pemetaan Peluang Dan Tantangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Focus Group Discussion (Fgd) Di Desa Kesamben, Kabupaten Malang. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 53-62.
- Dian Herlina, A. (2023). Pengembangan Digitalisasi BUMDes Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus BUMDes Makmur Abadi Sejahtera).
- Dina Irawati, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 41-51.
- Dwidela Infantriani Ratmasari, N. L. (2021). Kualitas Laporan Keuangan BUMDES dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Borobudur Accounting Review*, 66-77.
- E.P, L. F., P, A. S., & Sinaga, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi.

- Ema Sasmita, A. S. (2022). Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Teori Ekonomi Politik. *Jurnal Risma*.
- Endang Malasari, T. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Podho Joyo Kabupaten Gresik.
- Harefa, H. Y. (2021). The Establishment of Optimized Management of The Economic Potential of Regional Communities Through. *International Journal of Regional Innovation*, 16-22.
- I Gede Made Karma, I. M. (2024). Integration of Business Unit Financial Reporting Systems in Village-Owned Enterprises (BUMDes). *International Journal of Social Science and Human Research*, 6894-6899.
- I Putu Gede Abdi Sudiarmika, N. W. (2024). Transformasi Menuju Desa Digital: Pemberdayaan BumDes Melalui Inovasi Manajemen Keuangan dan Implementasi IOT.
- Iriyanti, A. M. (2023). Systematic Literatur Review: Penerapan Sistem Informasi Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Di BUMDes, 218-225.
- Jopang, A. T. (2022). BUM Desa: Strategi Pengembangan Untuk Transformasi Sosial Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 107-126.
- Josafat Gracia Ginting, L. G. (2023). Membentuk Badan Usaha Milik Desa Berdaya Maju Melalui Transformasi Digital dan Implementasi Anggaran Dasar.
- Tarmidzi & Ifka Arismiyati (2018). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes. *Jurnal Dimas*, 10.21580/dms.2018.181.2917.
- Purwanto, A. (2022). Kepemimpinan dalam Pengelolaan BUMDes. Semarang: Unnes Press.
- Rahmawati, D. (2023). Kaderisasi Pengurus BUMDes. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Suryana, E. (2021). Model Pengembangan BUMDes Berbasis Kapasitas Lokal. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, A. & Saputra, B. (2020). Dinamika Pengelolaan BUMDes di Era Digital. Penerbit LPPM Untirta .
- Prasetyo, D. (2021). Analisis Kinerja Unit Simpan Pinjam BUMDes. *Jurnal Ekonomi Desa*, 5(2), 45-60 .
- Wibowo, S. dkk. (2022). Digitalisasi BUMDes: Studi Kasus di Jawa Timur. Seminar Nasional Ekonomi Desa .

- Sari, R. & Utami, P. (2019). Dampak Pendampingan BUMDes terhadap UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1).
- Hakim, L. & Fauzi, A. (2020). *Evaluasi Kinerja BUMDes: Pendekatan Kualitatif*. Penerbit Unpad Press.
- Najmudin dkk. (2025). Digital Transformation of BUMDes Financial Management. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 4(6), 2202-2211.
- Parika, L. dkk. (2022). Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Berdasarkan Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik. *Kertha Semaya Journal*, 10(4).
- Afandi, M.N. (2022). Penguatan Pengelolaan BUMDes melalui Model Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 176-189.
- Sagala, M.K.A. & Siregar, S. (2023). Pengelolaan Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi BUMDes. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Haryadi, M.F. & Fathoni, L.A. (2024). Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Terhadap Kerugian. *Commerce Law Journal*, 4(1).
- idlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 8(3).
- Nurhayati (2018). *Peran BUMDes Tirta Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pongok*. Skripsi STPMD APMD Yogyakarta.